



Jagongan Jaga Warga Bersama Satpol PP DIY

Politisi Muda PDIP Eko Suwanto Desak Pemda DIY Alokasikan Dana Berbasis Kampung di Kota Jogja

YOGYA, TRIBUN - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan, diskusi soal sampah belum berhenti sampai saat ini. Namun, Eko mengingatkan, pentingnya mengetahui siapa sebetulnya pihak paling bertanggung jawab atas tata kelola sampah.

Berdasar ketentuan undang-undang, penanggung jawab pengelolaan sampah ini Bupati/Wali Kota. Gubernur, Kementerian memberikan dukungan untuk Bupati Wali Kota ini agar saling kerjasama dalam penyelesaian masalah sampah," papar politisi PDI Perjuangan, saat menjawab pertanyaan warga pada acara Jagongan Warga bertema Pembangunan Jogja Berbasis Kampung di Gedung Madu Nusantara Yogyakarta, Selasa (19/9).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini pun memuji peran besar masyarakat akan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat Kota Yogyakarta sudah banyak yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah.

Terkait UMP DIY pada 2023 ini, Eko menyebutkan, sudah di atas Rp2 juta. "Kita yang tertinggi di Kota, yakni Rp2,3 juta. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, papan. Lalu, lapangan pekerjaan, sampai hari ini, angka pengangguran di DIY ini 4%. Jadi, jika ada 100 orang kumpul, ini 4 orang tak tahu sehabis bangun tidur mau ngapain, tidak tahu bangun tidur mau makan apa, tidak tahu bahwa dulu mau ngerjain apa," jelas Eko.

Menurut Eko, hal itu yang harus segera dibersikan dengan cara APBD-nya dijadikan stimulus untuk penciptaan lapangan kerja misalnya. "Kemudian yang kedua, yang juga penting terkait perekonomian adalah selain menciptakan lapangan kerja akses kesehatan. Masyarakat Kota Yogyakarta



BANTUAN - Politisi PDI Perjuangan Eko Suwanto menjelaskan penggunaan alat komunikasi handy talky (HT) kepada Kelompok Jaga Warga di Kemantren Gondokusuman.



INTERAKSI - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto bersama Satpol PP DIY dan kelompok masyarakat Kemantren Gondokusuman pada Jagongan Jaga Warga di Gedung Madu Nusantara Yogyakarta, Selasa (19/9).

misalnya, tidak semua nama warga tercantum dalam DTKS.

"Yang menerima KMS kurang lebih baru separuh, yakni baru sekitar 19.000 KK yang 24.000 KK belum menerima fasilitas itu. Pemerintah membagikan beras, misalnya, ini bagian upaya kita soal perlindungan sosial. Nah, ide pembangunan berbasis Kampung inilah yang harapan kita menjadi jawaban, kenapa berbasis kampung ini dalam kesejarahan Kota Jogja, kampung ini harapan kita menjadi kelembagaan asli Kota Jogja," ucapnya.

Sementara Sekretaris Satpol PP DIY, Arif Rachman Hakim mengatakan, tugas Satpol PP ini membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan, terutama bidang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Selama Januari sampai Maret lalu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada linmas.

"Lalu pada April sampai saat ini, kami melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dengan pembinaan kepada kelompok Jaga Warga. Ini kami lakukan dalam rangka mendukung keamanan,

ketenteraman dan ketertiban umum. Apabila suatu daerah atau kampung itu tertib, tenteram dan aman, otomatis nanti akan meningkatkan kesejahteraan," tandas Arief.

Ia menerangkan, dengan rasa kenyamanan masyarakat akan bisa melaksanakan aktivitas, baik budaya atau ekonomi, secara baik, maka akan mendukung pembangunan Jogja sebagai kota wisata, kota budaya, atau kota pendidikan.

"Jadi, kami sebagai aparat merasa mempunyai kewajiban untuk membantu mewujudkan

ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Kewenangan kami tak hanya ada di provinsi, tapi juga ke kabupaten dan kota melalui sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat.

Arief mengatakan, pembinaan instansinya di antaranya memberikan informasi terkait keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di masyarakat. "Terutama, menjelang tahun politik Pemilu 2024 nanti. Di mana akan ada kerentanan di masyarakat terkait perbedaan-perbedaan politik. Di sini lah kami bersama

kelompok Jaga Warga melakukan sosialisasi agar tetap terjaga kondisi aman dan tertib di masyarakat," lanjutnya.

"Tentunya, kami juga bersinergi dengan TNI maupun Kepolisian dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat ini," lanjut Arief. (ayu/ord)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005